KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI				H.4 X	Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 68 807 554 8 722 0000						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : LENI PRIYANTI						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF LEBIH TINGGI 20%	TARIF	PPh DIPOTONG/DTP	
(mm-yyyy)	BRUTO (Rp)	(Rp)	(TIDAK BER- NPWP)	(%)	(Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4 21-402-01	8.490.000	8.490.000	0	5	424.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota						
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022						
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy						
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.						
Nomor : Tanggal dd mmyyyy						
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :						
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :						
C.4 Tanggal	0 4 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penandatangan :	RIANDY					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :		Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.				
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						

26OA9QXR